

SKRIPSI

**FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN DALAM
PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN TANA
TORAJA**

JULTRISKHA RATU MATASAK

E011191021



**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2023



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jultriskha Ratu Matasak

NIM : E011191021

Program Studi : Administrasi Publik

Judul : Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Dalam
Pembangunan Bidang Pendidikan Di Kabupaten Tana Toraja.

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Dalam Pembangunan Bidang Pendidikan Di Kabupaten Tana Toraja" benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar dalam daftar ustaka.

Makassar, 25 Juli 2023



Jultriskha Ratu Matasak
E011191021



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Jultriskha Ratu Matasak
NIM : E011191021
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Dalam
Pembangunan Bidang Pendidikan Di Kabupaten Tana Toraja

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan sesuai dengan saran Tim Penguji Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

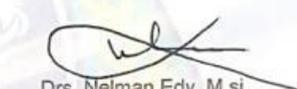
Makassar, 25 Juli 2023

Menyetujui:

Pembimbing I,


Dr. Muhammad Yunus, MA
NIP 195910301987031002

Pembimbing II,


Drs. Nelman Edy, M.si.
NIP 19610717198721011

Mengesahkan,
Ketua Departemen Ilmu Administrasi,


Prof. Dr. Fawzi, M.Si
NIP 19631015 198903 1 006





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Jultriskha Ratu Matasak
NIM : E011191021
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Dalam
Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Pendidikan Di
Kabupaten Tana Toraja

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan sesuai dengan saran Tim Penguji Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 25 Juli 2023

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Dr. Muhammad Yunus, MA

Sekretaris Sidang : Drs Nelman Edy, Msi

Anggota : 1. Dr. Suryadi Lambali, MA

2. Dr. Syaribulan, M.Si

Abstrak

Jultriskha Ratu Matasak (E011191021). Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Dalam Pembangunan Bidang Pendidikan Di Kabupaten Tana Toraja: 90 Halaman + 2 Tabel + 2 Gambar + Lampiran + Dibimbing oleh Muhammad Yunus dan Nelman Edy.

Pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu pembangunan membutuhkan pendekatan yang tepat, guna menghasilkan pertumbuhan yang disertai pemerataan. Bidang Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkembang dan dapat memenuhi tuntutan zaman. Dengan adanya Pendidikan manusia harus mampu untuk berpikir kreatif serta inovatif agar bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi nanti. Untuk memaksimalkan pencapaian dan berbagai sasaran pembangunan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien perlu dilakukan perencanaan yang baik serta diperlukan sistem pelaksanaan dan pengawasan guna menjamin sasaran pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menggambarkan Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten dalam Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Tana Toraja. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara. Adapun data sekunder diperoleh dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja dan Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dengan menggunakan 4 indikator oleh Robbins and Coulter(2016) yang terdiri dari Menetapkan standar (Standards), Pengukuran (Measurement), Membandingkan (Compare), dan Melakukan tindakan (Action).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tana Toraja terhadap Dinas Pendidikan sudah baik hanya saja pada Dinas Pendidikan perlu diperbaiki standar operasional prosedur agar bisa dijadikan pedoman dalam Inspektorat melakukan pengawasan dan juga Inspektorat bisa membuat standar pengawasan sendiri agar pengawasan bisa dilakukan secara maksimal

Kata kunci : Pengawasan, Pembangunan, Pendidikan

Abstrac

Jultriskha Ratu Matasak (E011191021). The monitoring Function of the District Inspectorate in the Development of the Education Sector in Tana Toraja Regency: 90 Pages + 2 Tables + 2 Pictures + Attachments + Supervised by Muhammad Yunus and Nelman Edy.

The development of an area aims to improve welfare and realize social justice for all levels of society. For this reason, development requires the right approach, in order to produce growth that is accompanied by equity. The field of education is one of the most important things to prepare human resources that are developing and able to meet the demands of the times. With education, humans must be able to think creatively and innovatively in order to be able to solve the problems they face later. In order to maximize the achievement of various development targets that have been planned effectively and efficiently, it is necessary to carry out good planning and an implementation and monitoring system is needed to guarantee development targets

This study aims to identify and describe the objectives to be achieved in this study, namely to describe the Oversight Function of the District Inspectorate in the Development of the Education Sector of Tana Toraja Regency. This research method uses a descriptive qualitative approach with primary data sources obtained through interviews. The secondary data was obtained from data from the Tana Toraja Regency Education Office and the Tana Toraja Regency Inspectorate using 4 indicators by Robbins and Coulter (2016) consisting of Setting standards (Standards), Measurement (Measurement), Comparing (Compare), and Taking action (action).

Based on the results of the research, it shows that the supervision carried out by the Tana Toraja Regency Inspectorate on the Education Office is good, it's just that the Education Office needs to improve standard operating procedures so that it can be used as a guideline for the Inspectorate to carry out supervision and also the Inspectorate can make its own monitoring standards so that supervision can be carried out optimally

Keyword : *monitoring, development, education*

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera, segala puji syukur penulis nantikan kehadiran Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan karunianya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten dalam Pembangunan Bidang Pendidikan di Kabupaten Tana Toraja.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi persyaratan kualifikasi gelar Sarjana Administrasi Publik bagi mahasiswa S1 (Strata 1) di Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis kepada kedua orang tua Bapak Yosep Murni Denpi dan Mama Ruth Ritta Tarukbua' serta kedua kakak penulis yaitu dr.Vany Matasak dan Shindy Rima Putri atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, maupun dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku rector Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin dan para staf
2. Prof. Dr. Phill. Sukri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta wakil dekan dan para staf

3. Prof. Dr. Alwi, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi dan Dr. Muh. Tang Abdullah, S.sos., M.A.P, selaku sekretaris Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Muhammad Yunus, MA selaku pembimbing 1 dan Drs. Nelman Edy, M.si. selaku pembimbing 2
5. Pak Suryadi Lambali, MA dan Ibu Dr. Syaribulan, M.si selaku Penguji Proposal dan Skripsi
6. Para Dosen program Studi Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
7. Para staf akademik yang telah membantu terkait kelengkapan berkas administrative penulisan skripsi
8. Insperktur inspektorat kabupaten tana toraja Pak Damoris Sembiring, AP., M.Si
9. Kepala dinas Pendidikan kabupaten tana toraja Pak Andarias Lebang S.pd
10. Teman-teman seperjuangan MIRACLE 2019 terimakasih telah membersamai penulisa semasa kuliah
11. Teman-teman KKN Gel. 107 Ujung Tanah Makassar
12. Terimakasih kepada teman-teman Remaja Jompo Chandra Kirana Mario, Natasya Matovani, Novita Diana Putri, Kezia Nadyaswari Assa, Revi Reul Buntugayang, Sabrina Sihombing, Syntia Sarel

Wulandari, Kevin Gohari, Ady Manurun, Jeknuar Pidun Taulabi', dan Jufaldi Nandar Sulu.

13. Terimakasih kepada Naufal Asril Efendi, Saiful Islam, Yulia Yulandari, A. Anissya Variza Rivai, Nur Hidayanti Salshabila, Rahima, Wildan Nurul Huda, Amar Ma'aruf, Amal Hamdika, Resti Alfina Safar, Besse Ummul, Naura Kamilah Asbachri, Ilham Ferdiandyah Nur yang telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan

14. Terimakasih kepada Era Jessica Parama, Nada Gamara Lembangan, Stevania Saskia, Athmy Hani, Dewi Fortuna Nimpa, Rindiani B. Yunus, Sara Malisan Lati, Kezia Rhema Lebang, Tazkia Anabanua, Gledis Lapod yang telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan

15. Terimakasih kepada Humanis Fisip Unhas yang telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan

16. Terimakasih kepada PMKO Fisip Unhas yang telah kebersamai penulis semasa perkuliahan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKIPSI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
Abstrak	v
Abstrac	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep Administrasi Publik.....	8
2.1.1 Pengertian Administrasi	8
2.1.2 Dimensi Karakteristik Administrasi	9
2.1.3 Pengertian Publik.....	11

2.1.4	Pengertian Administrasi Publik	12
2.2	Konsep Fungsi Pengawasan	14
2.2.1	Definisi Pengawasan.....	14
2.2.2	Maksud dan Tujuan Pengawasan	18
2.2.3	Indikator Pengawasan	22
2.2.4	Sifat dan Waktu Fungsi Pengawasan.....	23
2.2.5	Teknik Fungsi Pengawasan.....	25
2.2.6	Karakteristik Pengawasan yang Efektif	27
2.2.7	Syarat-syarat Pengawasan yang Efektif.....	29
2.2.8	Fungsi Pengawasan.....	32
2.2.9	Macam-macam Fungsi Pengawasan.....	33
2.3	Inspektorat.....	34
2.4	Konsep pembangunan.....	36
2.4.1	Pengertian Pembangunan	36
2.4.2	Tahapan Pembangunan	38
2.4.3	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembangunan	40
2.5	Konsep Pendidikan	41
2.5.1	Pengertian Pendidikan	41
2.5.2	Tujuan Pendidikan dan Fungsi Pendidikan.....	43
2.6	Kerangka Konsep	45
BAB 3 46		
METODE PENELITIAN		46
3.1	Jenis Penelitian	46
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
3.3	Fokus Penelitian	46

3.4	Informan Penelitian.....	47
3.5	Sumber Data.....	48
3.5.1	Data Primer	48
3.5.2	Data Sekunder	48
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.7	Teknik Analisis Data	49
BAB 4 52		
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....		52
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
4.2	Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten/Kota	54
4.3	Struktur Organisasi	57
4.4	Uraian Tugas dan Fungsi	57
BAB 5 60		
Hasil Penelitian		60
5.1	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat	60
5.1.1	Standar Pengawasan	66
5.1.2	Pengukuran.....	68
5.1.3	Membandingkan.....	76
5.1.4	Melakukan Tindakan	82
	85	
BAB 6 89		
Penutup 89		
6.1	Kesimpulan.....	89
6.2	Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....		91

DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1 Daftar Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kab. Tana Toraja Tahun Anggaran 2022.....	70
Tabel 5. 2 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep	45
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja.....	57

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bidang Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang yang berkembang dan dapat memenuhi tuntutan zaman. Dengan adanya Pendidikan manusia harus mampu untuk berpikir kreatif serta inovatif agar bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi nanti. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan kemampuan serta pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermanfaat di tengah masyarakat dunia”

Dari segi cakupan wilayah, pembangunan terdiri dari pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sedangkan pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya dengan baik serta pemberdayaan baik itu kekayaan alam maupun manusia dapat dimanfaatkan dan ditingkatkan secara optimal.

Undang-undang nomor 32 pasal 14 tahun 2014 mengatakan bahwa “Urusan wajib yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk

kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan”. Yang artinya pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh atas perencanaan dan pembangunan suatu daerah. Dalam undang-undang tersebut juga mengatur tentang pengalokasian dana kepada pemerintah daerah dan pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah. Yang artinya pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelolah dana yang ada untuk merencanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu pembangunan membutuhkan pendekatan yang tepat, guna menghasilkan pertumbuhan yang disertai pemerataan. Infrastruktur berperan penting dalam peningkatan investasi dan memperluas jangkauan partisipasi masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan. Pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tersebut memerlukan berbagai faktor pendukung salah satu yang penting adalah keberadaan infrastruktur. Kebutuhan pembangunan infrastruktur akan semakin meningkat seiring dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi. Dalam rangka melakukan transformasi untuk meraih perbaikan kualitas pembangunan , maka perlu dilakukan pengawasan terhadap seluruh tindakan dari proses transformasi tersebut.

Untuk memaksimalkan pencapaian dan berbagai sasaran pembangunan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien perlu dilakukan perencanaan yang baik serta diperlukan sistem pelaksanaan dan pengawasan guna menjamin sasaran pembangunan. Pengawasan berarti

sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi, dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. Pengawasan merupakan suatu follow up dari perintah yang sudah ditentukan, agar perintah tersebut benar-benar dilaksanakan. Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat mencegah terjadinya kesalahan yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan.

Perencanaan pengawasan suatu unit pengawasan tidak terlepas dari perencanaan stratejik dari masing-masing unit pengawasan tersebut. Perencanaan pengawasan stratejik yang sering dikenal dengan rencana strategis dimulai dari penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang memiliki rentang waktu periode jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Pengawasan dilakukan guna memperhatikan pelaksanaan perencanaan agar terlaksana sesuai dengan rencana yang telah di tentukan.

Pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

Pembangunan di Indonesia belum semuanya merata dilaksanakan. Masih banyak daerah-daerah diluar pulau jawa yang membutuhkan

pembangunan guna meningkatkan fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh masyarakat. Meskipun semenjak menjabatnya presiden Joko Widodo pembangunan diluar jawa mulai diperhatikan terutama di daerah 3T(tertinggal,terdepan, dan terluar).

Beberapa faktor juga yang memperlambat pembangunan di Indonesia yaitu kualitas SDM(sumber daya manusia) yang kurang. Indonesia termasuk negara dengan tingkat SDM yang tinggi, tetapi kualitas SDM yang ada tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya banyak proses pembangunan di Indonesia mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari luar. Faktor selanjutnya yaitu kurangnya integritas para pejabat pemerintah sehingga uang yang harusnya digunakan untuk kepentingan negara malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau korupsi. Buktinya banyaknya bangunan terbekal yang tidak selesai. Dan juga alasan pembangunan di Indonesia terhambat yaitu karena adanya penyebaran virus Covid-19 yang membuat dana yang disediakan untuk pembangunan infrastruktur dialokasikan untuk penyediaan alat Kesehatan serta digunakan juga untuk penyediaan bantuan untuk masyarakat Indonesia yang tidak mempunyai penghasilan karena seluruh pembatasan aktivitas guna mengurangi penyebaran virus covid-19 yang pada saat itu sangat urgent dan harus disediakan

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja berubah menjadi Kabupaten Tana Toraja. Luas wilayah Kabupaten Tana Toraja menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 sekitar 2.054,30 km² atau 4,51 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi

Selatan, dan terletak pada koordinat 119⁰ - 120⁰ Bujur Timur dan 2,40⁰ – 3,23⁰ Lintang Selatan

Arah pembangunan Tana Toraja dipusatkan pada dua sektor utama yaitu Pendidikan dan pariwisata. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Sekalipun bertubi-tubi program kepariwisataan direncanakan, tetapi apabila tidak didukung oleh program-program yang meyakinkan dalam bidang pendidikan, kecil kemungkinan untuk mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, maka kemajuan dalam sektor kepariwisataan akan nampak dengan jelas. Membaiknya kualitas pendidikan tidak hanya berperan dalam mengelola kepariwisataan, tetapi juga dalam pergerakan kemajuan Kabupaten Tana Toraja.

Tana Toraja memiliki kekayaan potensi kepariwisataan serta situs-situs budaya yang bisa dijadikan peluang agar menarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara yang tertarik menjelajahi tempat wisata alam dan budaya. Kepariwisataan dijadikan sebagai arah pembangunan karena didukung oleh kondisi internal alam dan masyarakatnya. Bahkan seluruh wilayah Tana Toraja dapat dikategorikan sebagai “Taman Wisata” karena banyak tempat di Tana Toraja yang bisa dijadikan objek wisata

Menurut data BPS pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Tana Toraja yang menyelesaikan Pendidikan sekolah menengah atas sebesar 22.01% dan yang tidak/tamat sekolah dasar sebesar 34.64%. Hal ini bisa terjadi karena kurang kesadarannya masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Banyak anak di Tana Toraja membantu orang tuanya bekerja di

sawah atau kebun dan dari pekerjaan itu sudah mendapatkan penghasilan sehingga sudah menganggap bahwa sekolah tidak penting.

Fasilitas yang disediakan sekolah pun menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan minat belajar siswa. Fasilitas yang lengkap dan bagus dapat membuat siswa lebih bersemangat untuk belajar karena kelengkapan dan kenyamanan kelas membuat siswa menjadi lebih bersemangat belajar. Masih banyak sekolah di Kabupaten Tana Toraja memiliki fasilitas yang kurang baik bahkan tidak bisa digunakan. Ruang kelas yang rusak dapat membuat siswa menjadi malas belajar dan bahkan tidak ingin bersekolah karena fasilitas yang kurang memungkinkan, apalagi sekarang penentuan masuk sekolah berdasarkan zonasi yang artinya siswa tidak bisa memilih sekolah yang diinginkan karena sistem zonasi yang berlaku.

Masyarakat di Kabupaten Tana Toraja masih sangat menganggap bahwa pendidikan itu kurang penting. Buktinya pada tahun 2016, Tana Toraja berada pada urutan ke-23 dari 24 kabupaten yang berada di Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan hasil penilaian mutu pendidikan oleh LPMP. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena Pendidikan adalah hal yang paling penting untuk meningkatkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif.

Meskipun dengan adanya peluang yang dapat menjadi kekuatan untuk meningkatkan pendapatan negara dan daerah terdapat kelemahan yang dimiliki daerah yaitu masih rendahnya ketrampilan birokrasi termasuk kemampuan membuat Proposal dan Rencana. Di samping masih rendahnya kemampuan menjalin jaringan yang tersebar di berbagai tempat juga terdapat rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berpendidikan

dan keterampilan masyarakat yang turut berkontribusi terhadap kemampuan menangkap Peluang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten dalam Pembangunan Bidang Pendidikan di Kabupaten Tana Toraja?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain yaitu untuk menggambarkan Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten dalam Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Tana Toraja.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten dalam Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Tana Toraja.
2. Manfaat praktis sebagai pengetahuan akan pentingnya fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur dalam proses pembelajaran maupun pengambilan keputusan yang berhubungan dengan fungsi pengawasan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Administrasi Publik

2.1.1 Pengertian Administrasi

Herbert A. Simon (1999:3) yang berhasil dikutip oleh (Harbani Pasolong 2014), mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan- kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Leonard D. White dalam Inu Kencana Syafiiie dkk. (1999) yang bererhasil dikutip (Wirman Syafri 2012), mendefinisikan administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada usaha kelompok–kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.

Dwight Waldo (1971) yang berhasil dikutip oleh (Dr. Hardiyansyah, Msi, Dr. Mukram, M.B.A, Trisninawati, S.E., M.M 2022), mengemukakan bahwa: Administrasi adalah suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rationaliteit yang tinggi

William H. Newman (1963) yang berhasil dikutip oleh (Dr. Hardiyansyah, Msi, Dr. Mukram, M.B.A, Trisninawati, S.E., M.M 2022), berpendapat bahwa: Administrasi adalah bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan dari pada usaha dari sekelompok individu menuju pencapaian tujuan bersama.

S.P. Siagian (1997) yang berhasil dikutip oleh (Dr. Hardiyansyah, Msi, Dr. Mukram, M.B.A, Trisninawati, S.E., M.M 2022),

mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

S. Prajudi Atmosudirdjo yang berhasil dikutip oleh (Sahya Anggara) Administrasi adalah proses dan tata kerja yang terdapat pada setiap usaha; usaha kenegaraan atau swasta, usaha sipil atau militer, usaha besar, atau kecil.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa proses kegiatan melakukan pekerjaan yang sudah tersusun dan terencana untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

2.1.2 Dimensi Karakteristik Administrasi

Dimensi karakteristik administrasi dalam buku Pengantar Ilmu Administrasi (Dr. Darmanto, M.Ed, Drs. Ayi Karyana, M.Si., Drs. Enceng, M.Si 2019) terdiri atas:

1. Efisien berarti bahwa tujuan (motive) dari pada administrasi adalah untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien. Dengan kata lain bahwa pencapaian tujuan administrasi dengan hasil 4 TEORI ADMINISTRASI PUBLIK yang berdaya berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efisien).

James L. Gibson dkk. (1996), mengatakan bahwa efisien adalah perbandingan rasio keluaran dengan masukan.

Tjokroamidjojo (1980), adalah pelaksanaan administrasi publik dilakukan dengan perbandingan yang terbaik antara hasil dan pengeluaran. Jelasnya yang dimaksud efisien adalah "perbandingan yang terbaik antara input dan output atau perbandingan antara

pengeluaran dan keuntungan". Misalnya hasil maksimum yang dicapai dengan penggunaan sumberdaya yang terbatas. Dengan kata lain perbandingan antara apa yang telah dihasilkan dengan apa yang seharusnya diselesaikan.

2. Efektifitas pada dasarnya berasal dari kata "efek" dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

James L. Gibson dkk. (1996), mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas.

Tjokroamidjojo (1987), mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil.

Keban (2004), mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama antara para stakeholder dari organisasi yang bersangkutan.

3. Rasional berarti bahwa tujuan yang telah dicapai bermanfaat untuk maksud yang berguna, tetapi tentu saja yang dilakukan dengan sadar atau disengaja.

Herbert A. Simon (2004) yang berhasil dikutip oleh (Lina Marlioni), mengatakan bahwa rasional secara objektif, jika tujuan yang hendak

dicapai untuk kepentingan organisasi, rasional bersifat subjektif, jika tujuan yang hendak dicapai untuk kepentingan pribadi.

Dwight Waldo (1986) yang berhasil dikutip oleh (Lina Marliani) memberi penjelasan apakah yang dimaksud rasional itu, dan menurut pakar ini tindakan rasional adalah suatu tindakan yang telah diperhitungkan secara tepat untuk merealisasikan tujuan tertentu yang diinginkan dengan pengorbanan yang sedikit-dikitnya bagi realisasi tujuan yang lain. Dengan kata lain tindakan rasional adalah tindakan yang dapat diterima oleh logika praktis.

Ritzer (2005) yang berhasil dikutip oleh (Lina Marliani), mengatakan bahwa rasionalisasi terbaik saat ini ialah restoran cepat saji, yaitu sistem rasional formal di mana seorang pekerja dan pelanggan digiring untuk mencari cara paling rasional dalam mencapai tujuan. Mendorong makanan melalui jendela misalnya ialah cara rasional karena dengan demikian pelayanan pelanggan efektif dan efisien.

2.1.3 Pengertian Publik

H. George Frederickson (1997:46) yang berhasil dikutip oleh (Dr. Samson Laurent, MT, M.Si 2015) , menjelaskan konsep "publik" dalam lima perspektif, yaitu

(1) publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi 8 TEORI ADMINISTRASI PUBLIK kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat,

(2) publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri,

(3) Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik diwakili melalui "suara".

(4) Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Karena itu posisinya juga dianggap sebagai publik, dan

(5) Publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting

2.1.4 Pengertian Administrasi Publik

Chandler & Plano dalam yang berhasil dikutip oleh (Keban, Yeremias T.), mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler & Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (art and science) yang ditujukan untuk mengatur "public affairs" dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Barton dan Chapple yang berhasil dikutip oleh (Keban, Yeremias T) melihat administrasi public sebagai "the work of government" atau pekerjaan yang dilakukan pemerintah.

Nigro yang berhasil dikutip oleh (Keban, Yeremias T) mengemukakan bahwa administrasi public adalah usaha Kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan public, yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislative dan eksekutif mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan public sehingga menjadi bagian dari proses politik; sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta, dan berkaitan erat dengan beberapa kelompok awasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Nicholas Henry yang berhasil dikutip oleh (Keban Yeremias T) memberi batasan bahwa administrasi public adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan public agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial. Adminitrasi public berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Dwight Waldo (1971) yang berhasil dikutip oleh (inu kencana) mendefinisikan administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Nicholas Henry (1988) yang berhasil dikutip oleh (inu kencana) mendefinisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan

sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Prajudi Atmosudirjo (1982) yang berhasil dikutip oleh (inu kencana) “Administrasi Publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

David H. Rosenbloom (2005) yang berhasil dikutip oleh (Keban Yeremias T.), menunjukkan bahwa administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi public adalah sekumpulan orang/kelompok yang bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan pemerintahan agar pekerjaan yang dilakukan bisa efisien serta efektif.

2.2 Konsep Fungsi Pengawasan

2.2.1 Definisi Pengawasan

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan untuk mengevaluasi pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai rencana atau tidak, bukan mencari siapa yang benar dan salah. Tetapi lebih kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang

ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.

Mc. Farland yang berhasil dikutip oleh (Handayani 1985) memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut: “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies*”. (pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan).

Menurut Usman Effendi (2014) yang berhasil dikutip oleh (Dr. Rahmawati Sururama, S.STP, M.si dan Rizki Amalia S.STP, MAP 2020), mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil

Pengertian pengawasan menurut Victor M. Sitomorang dan Jusuf Juhir adalah bahwa setiap usaha dan Tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Menurut Siagian yang berhasil dikutip oleh (Baktiyasal dan Farida. 2017), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya

Menurut Irham Fahmi (2014)) yang berhasil dikutip oleh (Dr. Rahmawati Sururama, S.STP, M.si dan Rizki Amalia S.STP, MAP 2020) pengawasan didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukungnya visi dan misi suatu organisasi

Henry Fayol dalam bukunya “General Industrial Management” menyatakan pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan

Sarwoto (2010)) yang berhasil dikutip oleh (Dr. Rahmawati Sururama, S.STP, M.si dan Rizki Amalia S.STP, MAP 2020), menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Dari definisi yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Kepentingannya tidak diragukan lagi seperti halnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, karena pengawasan dapat menentukan apakah dalam proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang direncanakan atautakah belum

Menurut Rahayu Relawati (2012) yang berhasil dikutip oleh (Fatimah 2020), alasan penting dalam pengembangan dan penerapan sistem pengawasan adalah karena orang-orang sering melakukan kesalahan sehingga dirancang sistem pengawasan secara efektif akan mampu mendeteksi peramalan dan keputusan yang salah, sehingga kerugian dapat diminimisasi.

Menurut Murdick 2009 yang berhasil dikutip oleh (Fatimah 2020), "pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagi manapun rumit dan luasnya suatu organisasi". Proses dasarnya menurutnya terdiri dari tiga tahap :

- 1) Menetapkan standar pelaksanaan.
- 2) Pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar.
- 3) Menentukan kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar dan rencana

Menurut Stoner dan Wankel yang berhasil dikutip oleh (Rahmawati Sururaman). "Pengawasan berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke jalur tujuan yang benar ".

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pimpinan agar perencanaan yang akan dilakukan sesuai dengan yang direncanakan dan bahwa perlu dilakukannya suatu pengawasan yang dilakukan secara rutin ataupun berkala oleh pimpinan atau orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pencapaian suatu tujuan yang efektif dan efisien dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

2.2.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan

Maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga kedepannya mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik menurut Leonard D. White (1998:23) yang berhasil dikutip oleh (Fatimah 2020), maksud dari pengawasan adalah:

1. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat
2. Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang dari pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan

Lebih lanjut menurut Arifin Abdul Rachman (2001: 23) yang berhasil dikutip oleh (Fatimah 2020), maksud dari pengawasan adalah:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.

Menurut Sule dan Saefullah (2005) ada empat tujuan pengawasan tersebut adalah adaptasi lingkungan, meminimumkan kegagalan, meminimumkan biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi.

1. Adaptasi lingkungan adalah agar perusahaan dapat terus menerus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal.
2. Meminimumkan kegagalan adalah ketika perusahaan melakukan kegiatan produksi misalnya perusahaan berharap agar kegagalan seminimal mungkin.
3. Meminimumkan biaya adalah ketika perusahaan mengalami kegagalan.
4. Antisipasi kompleksitas organisasi adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks.

Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya terjadi tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan. Apakah pekerjaan yang dilakukan tersebut berjalan secara efektif dan efisien atau bahkan sebaliknya. Tujuan pengawasan juga berfungsi untuk mengetahui apakah segala pekerjaan dilakukan dengan lancar sesuai rencana, petunjuk, dan perintah yang diberikan, serta mencari jalan keluar untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan kegagalan serta mencegah terjadinya hal yang sama.

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidaknya harus dapat dengan

segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana. Apa yang telah terjadi dapat disetir ke tujuan tertentu. Oleh karena itulah, suatu sistem pengawasan yang efektif harus dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan sehingga berdasarkan penyimpangan-penyimpangan itu dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-- benar dapat sesuai atau mendekati apa yang direncanakan sebelumnya.

Situmorang dan Juhir (1994:26) dalam buku Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah juga mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

1. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna (dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab.
2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.
3. Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Di bawah ini merupakan penjelasan tujuan pengawasan oleh beberapa ahli:

1. Menurut Simbolon (2004:61) yang berhasil dikutip oleh (Murhaini Suriansya), Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan

diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Menurut Bohari yang berhasil dikutip oleh (Murhaini Suriansya) tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan kesalahan atau hambatan kepada pimpinan atau penanggung jawab kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan yang korektif yang perlu.
3. Menurut Siagian yang berhasil dikutip oleh (suparmin) pengawasan dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya diviasi dalam operasional atau rancana, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efesiensi dan efektifitas yang setinggi mungkin.
4. Menurut Silalahi yang berhasil dikutip oleh (Murhaini Suriansya) tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut :
 - Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
 - Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
 - Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
 - Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
 - Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan. Agar tujuan tersebut tercapai, maka akan lebih baik jika tindakan

kontrol dilakukan sebelum terjadi penyimpanganpenyimpangan sehingga bersifat mencegah (preventif control) dibandingkan dengan tindakan kontrol sesudah terjadi penyimpangan (repressive control).

2.2.3 Indikator Pengawasan

Menurut Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016) pengawasan terdiri dari empat indikator yaitu :

1. Menetapkan standar (Standards) yakni penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi.
2. Pengukuran (Measurement) yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.
3. Membandingkan (Compare) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.
4. Melakukan tindakan (Action) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (deviasi) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan follow-up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

2.2.4 Sifat dan Waktu Fungsi Pengawasan

Sifat dan waktu fungsi pengawasan menurut Brantas (2000) sebagai berikut

1. *Preventive Control*

Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.

- a. Menentukan proses pelaksanaan
- b. Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan itu
- c. Menjelaskan dan atau mendemostrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu
- d. Mengorganisasi segala macam kegiatan
- e. Menentukan jabatan, *job description*, *authority*, dan *responsibility* bagi setiap individu karyawan
- f. Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan
- g. Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat masalah

Preventive control ini adalah pengawasan yang terbaik karena dilakukan sebelum terjadi kesalahan.

2. *Respressive Control*

Pengawasan yang dilakukan terjadi setelah terjadi kesalahan dan pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai

dengan yang diinginkan. Repressive control ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- A. Membandingkan antara hasil dengan rencana
- B. Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari Tindakan perbaikannya.
- C. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya
- D. Menilai Kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada
- E. Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksana melalui training atau education

3. Pengawasan saat proses dilakukan

Jika terjadi kesalahan segera perbaiki

4. Pengawasan berkala

Pengawasan yang dilakukan secara berkala misalnya perbulan, pertahun, persemester dan lain-lain

5. Pengawasan mendadak(sidak)

Pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik.

Pengawasan mendadak ini sesekali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga baik.

6. Pengawasan melekat(waskat)

Pengawasan yang dilakukan secara itergrative mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan-kegiatan dilakukan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sifat dan waktu pengawasan dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya penyimpangan saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Ataupun jika terjadi kesalahan dapat segera diperbaiki.

2.2.5 Teknik Fungsi Pengawasan

Menurut siagian (2008:15) bahwa, pengawasam yang efektif jika pengawasan tersebut dilaksanakan dengan teknik, sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat terbentuk dengan inspeksi langsung dan pemangatan langsung. Dalam inspeksi langsung dapat dengan peninjauan pribadi yaitu mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Cara ini mengandung kelemahan, menimbulkan kesan keada bawahan bahwa mereka diamati secara keras dan kuat sekali. Namun, ada yang berpendapat bahwa cara inilah yang terbaik, karena melakukan kontak langsung antara atasan dan bawahan dapat dipererat. Serta, kesukaran dalam praktek dapat dilihat langsung dan tidak dapat dikacaukan oleh pendapat bawahan sebagaimana mungkin terselip dengan cara menerima laporan.

Akan tetapi, karena banyak dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi besar seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan

langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung (Siagian,2008:115)

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan dan monitor.

Laporan ini berbentuk :

1. Laporan

Dalam hal ini laporan dapat bentuk:

a. Lisan

Pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan. Dengan cara ini kedua pihak aktif, bawahan memberikan laporan lisan tentang hasil pekerjaannya dan alasan dapat bertanya lebih lanjut untuk memperoleh fakta-fakta yang diperlakukan. Pengawasan seperti ini dapat mempercepat hubungan pejabat, karena adanya kontak wawancara antara mereka.

b. Tertulis

Laporan tertulis merupakan suatu pertanggungjawaban kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasannya kepadanya. Dengan laporan tertulis sulit pimpinan menentukan mana yang berupa kenyataan dan apa saja yang berupa berpendapat. Keuntungannya untuk

pemimpin dapat digunakan sebagai pengawasan dan bagi pihak lain dapat digunakan untuk menyusun rencana berikutnya.

2. Monitor

Monitor merupakan salah satu bentuk pengawasan tidak langsung yang dapat dilakukan tanpa melihat langsung kelapangan tempat dilaksanakannya pekerjaan namun dengan melihat dokumen-dokumen misalnya melalui pemantauan teknologi berupa CCTV (*Closed Circuit Television*) dan berupa video bukti yang diambil di lapangan saat menjalankan tugas.

2.2.6 Karakteristik Pengawasan yang Efektif

Pengawasan yang efektif berarti pengawasan yang tepat harus sesuai dengan proses yang akan dilaluinya, tanpa menyimpan dari sistem yang dianut sehingga tahapan yang dilaluinya benar. Pengawasan dapat dikatakan sebagai suatu sistem, seperti halnya sistem- sistem yang lain mempunyai karakteristik tertentu, yaitu:

a. Akurat

Informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang harus akurat sebab ketidak akuratan dapat menyebabkan pengambilan tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebelumnya tidak ada.

b. Tepat waktu

Segala informasi yang harus disampaikan dan dapat dievaluasi secepatnya agar dapat segera dilakukan tindakan koreksi

sebelum menjadi kritis jika terjadi kelambatan dalam reaksi terhadap penyimpangan, kerugian yang dihadapi akan semakin besar. Untuk menghindari hal ini, maka sebaiknya pengawasan dilakukan secara rutin, tetapi untuk hal- hal yang sangat penting perlu juga dilakukan pengawasan diluar kontrol rutin.

c. Objektif dan menyeluruh

Informasi dimana dalam suatu sistem pengawasan harus mudah dipahami dan dapat dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Makin objektif sistem pengawasan tersebut, maka makin banyak kemungkinan bahwa individu dengan sadar dan efektif yang akan merespon informasi yang diterima, begitu pun sebaliknya. Sistem informasi yang sulit dipahami dapat mengakibatkan bias yang seharusnya tidak perlu dan kebingungan atau stres diantara para karyawan.

d. Terpusat pada titik- titik pengawasan strategis

Pengawasan seharusnya dapat memusatkan perhatian pada penyimpangan- penyimpangan yang paling sering terjadi dan dapat menimbulkan akibat yang fatal.

e. Realistik secara ekonomis

Biaya pelaksanaan pengawasan harus lebih rendah atau hampir tidak sama dengan nilai kegunaannya.

f. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi

Informasi pengawasan yang didapat harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi karena bagaimana pun setiap

tahap dalam proses kegiatan dapat memengaruhi hasil keseluruhan operasi.

g. Fleksibel

Pengawasan harus memiliki fleksibilitas agar dapat memberikan daya tanggap suatu reaksi terhadap perubahan-perubahan lingkungan.

h. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional

Sistem pengawasan yang efektif harus dapat menunjukkan hasil penyimpangan dan tindakan koreksi yang harus diambil.

i. Diterima oleh anggota organisasi

Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan yang bertanggung jawab dan berprestasi. Oleh karena itu, sistem pengawasan hendaknya dijelaskan terlebih dahulu kepada semua anggota organisasi

2.2.7 Syarat-syarat Pengawasan yang Efektif

Syarat-syarat pengawasan dikemukakan oleh Simbolon dalam Fitrianingrum (2015, p.1646) yaitu :

a. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang

Semua sistem dan teknik pengawasan harus menggambarkan /menyesuaikan rencana sebagai pedoman. Maksud daripada pengawasan ialah untuk meyakinkan bahwa apa yang diselesaikan itu sesuai dengan rencana.

- b. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya

Sistem pengawasan dan informasi dimaksudkan untuk membantu individu manajer pengawasan dan harus dikaitkan dengan pribadi individu untuk memperoleh informasinya. Informasi ini diperoleh dengan bermacam-macam cara sesuai dengan pribadi orangnya, apakah sebagai bendahara, kepala gudang, kepala proyek, dan sebagainya.

- c. Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan-penyimpangan pada hal-hal yang penting

Salah satu usaha yang sangat penting untuk mengaitkan pengawasan bagi keperluan efisiensi dan efektivitas ialah untuk meyakinkan bahwa mereka bermaksud untuk menunjukkan penyimpangan. Dengan kata lain dapat ditunjukkan penyimpangan dari pelaksanaan rencana yang berdasarkan atas prinsip-prinsip pengawasan.

- d. Pengawasan harus objektif

Pengawasan yang objektif ialah pengawasan yang berdasarkan atas ukuran-ukuran atau standar yang objektif yang telah ditentukan sebelumnya. Standar objektif dapat bersifat kuantitatif (dapat dihitung) dan dapat bersifat kualitatif (sukar dihitung). Yang bersifat kuantitatif, misalnya: biaya satuan, ukuran, dan volume

pekerjaan, lamanya waktu penyelesaian pekerjaan, dan sebagainya. Adapun yang bersifat kualitatif, misalnya: program pendidikan dan latihan karyawan, program penelitian dan pengembangan administrasi negara, program peningkatan suatu pengawasan, dan sebagainya.

e. Pengawasan harus luwes (fleksibel)

Fleksibilitas dalam pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai pelaksanaan rencana alternatif sesuai dengan berbagai kemungkinan situasi. Dalam praktek, pengawasan yang fleksibel hanya dapat diterapkan terhadap pelaksanaan rencana yang bersifat fleksibel pula.

f. Pengawasan harus hemat

Pengawasan harus dinilai dengan biaya. Biaya pengawasan relatif hemat, bila manfaatnya sesuai dengan pentingnya kegiatan, pengeluaran biaya pengawasan lebih kecil dibandingkan dengan besarnya resiko bila hal ini dilakukan tanpa adanya pengawasan.

g. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan (corrective action)

Sistem pengawasan akan tidak mempunyai arti apabila tidak membawa tindakan perbaikan. Sistem pengawasan yang efektif ialah apabila ditemukan terjadinya kegagalan-kegagalan, maka kepada siapa ia

harus bertanggung jawab, dan siapa yang dapat menjamin tindakan perbaikan.

2.2.8 Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jika tidak berjalan sebagaimana semestinya, maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain system informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Fungsi pengawasan menurut Simbolon (2004:62) mengemukakan bahwa, fungsi dari pengawasan yaitu :

1. Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan

4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

2.2.9 Macam-macam Fungsi Pengawasan

Macam-macam fungsi pengawasan menurut Brantas(2000), sebagai berikut

1. Internal Control

Internal control adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang atas kepada bawahannya. Cakupan dari pengawasan ini meliputi hal-hal yang cukup luas baik pelaksanaan tugas prosedur kerja, kedisiplinan karyawan, dan lain-lain.

2. External Control

External control adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar, pengawasan ekstern ini dapat dilakukan secara formal atau informal, misalnya pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan dan penilaian oleh masyarakat.

3. Formal Control

Formal control adalah pemeriksaan yang dilakukan instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern. Misalnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksan keuangan(BPK) terhadap BUMN dan lain-lainnya.

4. Informan Control

Informan control adalah penilaian yang dilalukan oleh masyarakat atau konsumen baik langsung maupun tidak

langsung misalnya melalui media cetak atau elektronik dan lain-lainnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai tugas melakukan pengawasan.

2.3 Inspektorat

Menurut PERMENDAGRI(Peraturan Menteri dalam Negeri) Nomor 107 tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inpektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 3 berbunyi:

- (1) Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 Pada Pasal 33 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah berbunyi :

- (1) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.
- (3) Inspektur Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
- (4) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten/kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.4 Konsep pembangunan

2.4.1 Pengertian Pembangunan

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai "Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara

dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)".

Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai "suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana." Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.

(Alexander 1994). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Husein Umar (2004:8) pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha perubahan untuk menuju ke keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu melalui pendayagunaan sumberdaya

Menurut Rogers (Rochajat, dkk, 2011) pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa

Rostow (Abdul 2004) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Effendi (2002) mengatakan pembangunan adalah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan.

Setelah melihat pembangunan menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang telah direncanakan untuk menuju arah yang lebih baik.

2.4.2 Tahapan Pembangunan

5 tahap Pembangunan menurut W.W. Rostow

- a. Masyarakat Tradisional Ilmu pengetahuan pada masyarakat ini masih belum banyak dikuasai. Karena itu, masyarakat semacam ini masih dikuasai oleh kepercayaan-kepercayaan tentang kekuatan di luar kekuasaan manusia. Manusia dengan demikian tunduk kepada alam, belum bisa menguasai alam. Akibatnya, produksi masih sangat terbatas. Masyarakat ini cenderung bersifat statis, dalam arti kemajuan berjalan dengan sangat lambat. Produksi dipakai untuk konsumsi. Tidak ada investasi. Pola dan tingkat kehidupan generasi kedua pada umumnya hampir sama dengan kehidupan generasi sebelumnya. Masyarakat tradisional diartikan sebagai suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi. Struktur social masyarakat ini berjenjang. Kekuasaan politik atau pemerintahan berpusat di daerah.
- b. Prakondisi untuk Lepas Landas Masyarakat tradisional, meskipun sangat lambat, terus bergerak. Pada suatu titik, dia mencapai posisi prakondisi untuk lepas landas. Biasanya, keadaan ini terjadi karena adanya campur tangan dari luar, dari masyarakat yang sudah lebih maju. Perubahan ini tidak datang karena faktor-faktor internal masyarakat tersebut, karena pada dasarnya masyarakat tradisional

tidak mampu untuk mengubah dirinya sendiri. Campur tangan dari luar ini menggoncangkan masyarakat tradisional itu. Di dalamnya mulai berkembang ide pembaharuan. Ide-ide yang berkembang ini bukan sekedar pendapat yang menyatakan bahwa kemajuan ekonomi dapat dicapai, tetapi bahwa kemajuan ekonomi merupakan suatu kondisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan lain yang dianggap baik: kebesaran bangsa, keuntungan pribadi, kemakmuran umum, atau kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka nantinya.

- c. Lepas Landas Periode ini ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan yang mengalami proses pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan merupakan sesuatu yang berjalan wajar, tanpa adanya hambatan yang berarti seperti ketika pada periode prakondisi untuk lepas landas. Pada periode ini, tabungan dan investasi yang efektif meningkat dari 5% menjadi 10% dari pendapatan nasional atau lebih. Juga, industri-industri baru mulai berkembang dengan sangat pesat. Keuntungannya sebagian besar ditanamkan kembali ke pabrik yang baru. Sektor modern dari perekonomian dengan demikian jadi berkembang.
- d. Bergerak ke Kedewasaan Setelah lepas landas, akan terjadi proses kemajuan yang terus bergerak ke depan, meskipun kadang-kadang terjadi pasang surut antara 10% sampai 20% dari pendapatan nasional selalu diinvestasikan kembali, supaya bisa mengatasi persoalan pertumbuhan penduduk. Industri berkembang dengan pesat. Negara ini memantapkan posisinya dalam perekonomian

global: barang-barang yang tadinya diimpor sekarang diproduksi di dalam negeri; impor baru menjadi kebutuhan, sementara ekspor barang-barang baru mengimbangi impor.

- e. Jaman Konsumsi Masal yang Tinggi Karena kenaikan pendapatan masyarakat, konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok untuk hidup, tetapi meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi. Produksi industri juga berubah, dari kebutuhan dasar menjadi kebutuhan barang konsumsi yang tahan lama.

2.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembangunan

Menurut Bratakusumah (2004:15) keberhasilan suatu perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut meliputi:

1. Lingkungan, faktor lingkungan ini bisa berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal). Baik dari luar maupun dari dalam. Eksternal biasanya datang dari wilayah tetangga atau pengaruh global yang berkembang dalam lingkup nasional maupun internasional, sedangkan internal merupakan pengaruh yang datang dari dalam wilayah perencanaan sendiri. Unsur-unsur yang terkandung didalamnya adalah sosial, budaya, ekonomi dan politik
2. Sumber daya manusia perencana, faktor sumber daya manusia merupakan motor penggerak perencanaan. Kualitas perencanaan yang baik akan lebih memungkinkan tercipta oleh sumber daya manusia yang baik. Harus bersifat komprehensif atau menyeluruh, sehingga

mempunyai pengetahuan intersektoral yang luas. Unsur-unsur yang terkandung di dalamnya adalah perencanaan sumber daya alam, perencanaan sosial ekonomi, dan perencanaan fisik dan infrastruktur.

3. Sistem yang digunakan, faktor sistem yang digunakan adalah aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh suatu daerah / wilayah tertentu sebagai dasar / landasan pelaksanaan perencanaan pembangunannya. Unsur-unsur yang terkandung di dalamnya adalah prosedur, mekanisme pelaksanaan, pengambilan keputusan, pengesahan, dll.
4. Perkembangan ilmu dan teknologi, faktor ilmu pengetahuan dapat memberikan pengaruhnya dimana tidak hanya dari segi peralatan namun dapat juga adanya berbagai teknik dan pendekatan manajemen yang lebih maju. Peralatan hanya merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi.
5. Pendanaan, faktor pendanaan pada dasarnya merupakan faktor yang sudah given. Artinya hal itu memang harus ada untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas.

2.5 Konsep Pendidikan

2.5.1 Pengertian Pendidikan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu: memelihara dan

memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.

Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Ahmadi dan Uhbiyati (2007: 70) mengemukakan bahwa pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak mencapai kedewasaan yang dicitacitakan dan berlangsung terus menerus.

Abdurrahman Saleh Abdullah (2007: 15) menjelaskan pendidikan sebagai proses yang dibangun masyarakat untuk membawa generasi-generasi baru kearah kemajuan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan kemampuan yang berguna untuk mencapai tingkat kemajuan paling tinggi

Jhon Dewey (2003: 69) menjelaskan bahwa "Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia".

Oemar Hamalik (2001: 79) menjelaskan bahwa "Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat"

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan orang dewasa kepada siswa atau siswi untuk membentuk karakter dan menciptakan generasi-generasi yang bermutu. (Dr. Rahmat Hidayat, 2019)

2.5.2 Tujuan Pendidikan dan Fungsi Pendidikan

Maunah (2009: 1) menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses pendidikan, baik tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dari alam sekitarnya dimana individu hidup.

Suardi (2010: 7) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Seluruh kegiatan pendidikan, yakni bimbingan pengajaran atau latihan, diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Dalam konteks ini tujuan pendidikan merupakan komponen dari sistem pendidikan yang menempati kedudukan dan fungsi sentral. Itu sebabnya setiap tenaga pendidik perlu memahami dengan baik tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan menurut UNESCO (United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization) mencanangkan empat pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa depan, yakni:

- (1) learning to Know (belajar menngetahui),
- (2) learning to do (belajar melakukan sesuatu),
- (3) learning to be (belajar menjadi sesuatu), dan
- (4) learning to live together (belajar hidup bersama)

Fungsi pendidikan mencakup beberapa poin di bawah ini.

1. Sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan hukum pendidikan.
2. Barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya.
3. Landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan pemerataan pendidikan.
4. Perlindungan fungsi pendidikan pada pakemnya agar tidak disalahgunakan untuk hal yang buruk

2.6 Kerangka Konsep

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep

